

**DETERMINAN AKSESIBILITAS INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR)
(Studi Empiris Pada IFR Pemerintah Daerah Pulau Jawa)**

Nuris Samsiyah

nurissamsiyah7@gmail.com

Ikhsan Budi Riharjo

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Financial information via the internet called IFR (Internet Financial Reporting) is a combination of internet multimedia capabilities and the capacity to communicate financial information interactively. The purpose of this study was to determine differences in IFR accessibility between the provincial government, district government, and city government, as well as to analyze the factors that affect IFR accessibility. Accessibility is the easiest way for users to get IFR. IFR accessibility is measured by using the Accessibility Index Value, which shows the ability of users to access data provided in e-government. The sample of this study was the regional government in Java Island which featured IFR 2015 with the number of samples was 40 local governments. The results of this study prove that there are differences in IFR accessibility between provincial governments, district government and city government. Government size and debt level of an area have an influence on IFR accessibility, while financial independence ratio does not affect IFR accessibility.

Keywords: *IFR accessibility, local government size, regional debt level and financial independence ratio.*

ABSTRAK

Informasi keuangan melalui internet disebut IFR (*Internet Financial Reporting*) merupakan kombinasi kemampuan multimedia internet dan kapasitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan secara interaktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan aksesibilitas IFR antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas IFR. Aksesibilitas adalah cara termudah bagi pengguna untuk mendapatkan IFR. Aksesibilitas IFR diukur dengan menggunakan Nilai Indeks Aksesibilitas (*Acessibility Index Value*), yang menunjukkan kemampuan pengguna untuk mengakses data yang disediakan dalam *E-Government*. Sampel penelitian ini adalah pemerintah daerah di Pulau Jawa yang menampilkan IFR 2015 dengan Jumlah sampel adalah 40 pemerintah daerah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan aksesibilitas IFR antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Ukuran pemerintah dan tingkat hutang suatu daerah memiliki pengaruh terhadap aksesibilitas IFR, sedangkan rasio kemandirian finansial tidak mempengaruhi aksesibilitas IFR.

Kata Kunci: Aksesibilitas IFR, ukuran pemerintah daerah, tingkat hutang suatu daerah dan rasio kemandirian finansial.

PENDAHULUAN

E-Government adalah bentuk upaya pemerintah untuk mengembangkan fungsi pemerintahan dengan berbasis elektronik. Elektronik pemerintah (*E-Government*) digunakan untuk pemerintah daerah agar kerja dan fungsinya menjadi optimal. *E-Government* adalah tempat untuk memberikan nilai lebih bagi partisipan di semua kalangan sebagai penyedia layanan informasi yang disajikan secara elektronik oleh pemerintah kepada publik, baik dalam hal keuangan dan non keuangan (Indrajit, 2004:107).

Laporan keuangan kepada publik atau masyarakat harus dilaporkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah provinsi secara detail untuk meningkatkan transparansi serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik serta dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Tujuan umum dari pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna untuk membantu pengambilan keputusan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 tahun 2010. Hal ini untuk pemerintah daerah wajib mengungkapkan semua informasi yang bertujuan agar menghindari kesalah pahaman dalam membaca laporan oleh masyarakat. Oleh karena itu laporan keuangan yang disajikan harus memenuhi pengungkapan yang akan memudahkan bagi pengguna laporan keuangan serta untuk memenuhi tuntutan atas peraturan yang ada.

IFR (*Internet Financial Reporting*) adalah pelaporan atau pengungkapan akuntansi sektor publik dengan menggunakan internet sebagai media *website* pemerintah (*E-Government*). Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di internet adalah salah satu perwujudan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010, komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Adapun pempublikasian LKPD merupakan cara yang dinilai efisien dan efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam demokratisasi informasi pemerintah memanfaatkan situs web daerah untuk mempermudah dalam pempublikasian informasi publik seperti kinerja pemerintah yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, salah satunya penelitian Styles dan Tennyson (2007) yang membahas kondisi keuangan suatu kota pendapatan per kapita, hubungan antara aksesibilitas dengan ukuran pemerintah, serta tingkat hutang. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pendapatan setiap masyarakat, jumlah penduduk, kondisi keuangan, serta tingkat hutang pemerintah kota memiliki hubungan serta ketersediaan laporan secara positif. Jumlah penduduk berbanding lurus dengan penduduk akan menuntut akses terhadap informasi keuangan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Verawaty (2012) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara *income per capita*, *size*, dan *debt level* dengan aksesibilitas laporan keuangan.

Pada Penelitian Wicaksono dan Prabowo (2016) disimpulkan bahwa Penerapan laporan keuangan pemerintah tidak berpengaruh terhadap

keputusan Pemerintah Daerah di Indonesia yang meliputi Internet kekayaan daerah, kompetisi politik, tingkat *leverage*, opini BPK atas LKPD tingkat pendapatan domestik regional bruto suatu daerah. Sedangkan menurut penelitian Nosihana dan Yaya, R (2016) menyatakan bahwa tingkat transparansi pada IFR yang berada di setiap pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia berpengaruh secara positif terhadap ukuran pemda dan kompetisi politik. Faktor yang tidak ditemukan buktinya dalam pengaruh yang signifikan terhadap IFR meliputi opini audit atas laporan keuangan pemda, tipe pemda, kekayaan pemda, serta *leverage*. Penelitian Setyaningrum (2012) setuju dengan hal tersebut dengan menyatakan kewajiban dalam mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah/kota di Indonesia melalui IFR tidak berpengaruh pada rasio kemandirian finansial keuangan daerah.

Pengungkapan IFR dengan mudah di *website* resmi pemerintah daerah di Indonesia tidak semua memaparkan hasilnya dengan beragam kondisi yang terjadi didalamnya. Atas dasar itulah, peneliti akan melakukan penilaian terhadap aksesibilitas IFR di masing-masing pemerintah daerah, yang terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di Pulau Jawa. Selain itu juga faktor determinan yang mempengaruhi tingkat kemudahan dalam mengakses IFR yang berada di setiap daerah di pulau Jawa dengan menggunakan ukuran pemerintah, tingkat hutang suatu daerah, serta rasio kemandirian finansial.

TINJAUAN TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori *Signalling*

Evans, John Patton dalam penelitiannya tahun 1987 yang menjelaskan tentang pengertian *signalling theory* yaitu berbagai sinyal yang dikirim oleh pihak yang mengemban amanat dalam hal ini (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam memberikan penilaian terhadap amanat yang telah diberikan oleh pihak pemberi amanat yaitu (masyarakat) tentang kesungguhan dalam melakukan amanat tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap masyarakat.

Sinyal-sinyal positif akan kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah akan mendorong kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menunjukkan salah satu prestasi atas kinerja pemerintah, baik pusat maupun daerah sebagai bukti positif terhadap sinyal-sinyal yang diberikan masyarakat terhadap pemerintah atas pertanggung jawaban keuangan negara/daerah kepada masyarakat. Semakin banyak sinyal positif yang diterima pemerintah sebagai pengemban amanat yang diberikan oleh masyarakat, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Teori Keagenan

Menurut Halim dan Abdullah (2006), di dalam teori keagenan terdapat dua pihak yang melakukan kontrak, dalam hal ini pihak yang menerima wewenang (*agent*) adalah pemerintah, sedangkan pihak yang memberikan wewenang (*Principal*) adalah masyarakat.

Menurut Zimmerman (1997), *Agency problem* muncul ketika principal (masyarakat) pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan kepada pihak agent (pemerintah). Permasalahan yang ditimbulkan dalam hubungan keagenan ini yaitu adanya asimetri informasi antara principal (masyarakat) dan agent (pemerintah). Permasalahan ini muncul karena ketimpangan informasi yang dimiliki pihak lainnya, karena salah satu pihak mempunyai informasi yang lebih banyak dibanding pihak yang lainnya. Dalam hal ini, pihak yang memiliki informasi yang lebih banyak adalah pejabat pada pemerintahan. Hal ini karena, pemerintah merupakan pihak yang menyelenggarakan pelayanan publik memiliki informasi yang lebih banyak, sehingga dapat membuat kebijakan dan keputusan yang hanya terfokus pada kepentingan pemerintah dan penguasa sehingga mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum. Untuk menghindari munculnya permasalahan tersebut, pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah.

Penelitian Terdahulu Dan Hipotesis Penelitian Aksesibilitas IFR Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota

Pada umumnya, kota-kota besar akan menyediakan program dan layanan publik yang lebih lengkap dibandingkan dengan kota-kota yang kecil (Giroux dan Shields, 1993). Selain kelengkapan data, umumnya kota-kota besar juga memberikan akses yang lebih cepat dan mudah pada para *stakeholder* untuk mendapatkan data yang mereka butuhkan.

Penelitian yang dikembangkan oleh Styles dan Tennyson (2007) bertujuan untuk membandingkan aksesibilitas IFR di pemerintah provinsi dan pemerintah kota di Amerika Serikat (U.S) dengan jumlah 300 sampel dan menggunakan indikator yaitu *Accessibility Index Value* dan *Mann Whitney Test*. Hasilnya pemerintah provinsi menampilkan IFR dengan poin *Accessibility Index Value* dan *Mann Whitney Test* yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah kota. Pemerintah provinsi merupakan pemerintah yang lebih disorot oleh masyarakat, sehingga pemerintah provinsi dalam melaksanakan tanggungjawabnya merasa lebih diawasi oleh publik dan *stakeholder* sehingga pemerintah provinsi akan memperbaiki kualitas pengungkapan pelaporan keuangan di internet bila dibandingkan dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H₁: Terdapat perbedaan aksesibilitas IFR pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota di Pulau Jawa.

Ukuran Pemerintah Daerah (SIZE)

Ukuran pemerintah daerah menggambarkan jumlah penduduk yang besar dari pemerintah daerah tersebut. Aktivitas dan program-program yang dimiliki oleh suatu daerah mencerminkan ukuran pemerintah daerah. Semakin besar program dan pelayanan, maka semakin besar pula sumber daya yang dibutuhkan (Giroux dan McLelland, 2003).

Hasil dari penelitian Styles dan Tennyson (2007) menyatakan bahwa akses yang lebih mudah terhadap informasi laporan keuangan di internet diberikan oleh kota-kota dengan jumlah penduduk yang lebih besar. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Nosihana dan Yaya R (2016) yang menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah dan kompetisi politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan IFR di pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H₂: Ukuran pemerintah daerah (*size*) berpengaruh positif terhadap aksesibilitas IFR pada pemerintah daerah di Pulau Jawa.

Tingkat Hutang (DEBT)

Menurut Zimmerman (1977), sektor publik menggunakan hutang untuk membiayai program dan layanan yang relevan untuk publik, hal tersebut merupakan pendorong bagi manajer sektor publik untuk mengurangi biaya hutang. Hal tersebut dapat diraih dengan IFR karena melalui media internet pendistribusian laporan keuangan menjadi lebih efisien, efektif, dan ekonomis.

Insentif yang diberikan oleh pemilik hutang untuk mempublikasikan jumlah hutang dalam laporan keuangan lebih besar dari biaya-biaya atau tekanan-tekanan regulasi dan politis apabila tidak melakukan pengungkapan hutang dalam laporan keuangannya. Hal ini disebabkan karena kreditur diuntut oleh pemberi hutang (debitur) untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dengan cara yang paling aplikatif atau dengan kata lain aksesibilitas yang lebih mudah dalam hal ini IFR melalui *E-Government*. Tujuannya yaitu agar debitur bisa mengetahui posisi keuangan kreditur dan mengetahui kemampuan kreditur untuk melunasi hutang.

Penelitian Styles dan Tennyson (2007) menyimpulkan bahwa *debt level* atau hutang berpengaruh positif terhadap aksesibilitas IFR. Karena semakin tinggi tingkat hutang, maka pemberi hutang (debitur) akan menuntut transparansi laporan keuangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H₃ : Tingkat hutang suatu pemerintah daerah (*debt*) berpengaruh positif terhadap aksesibilitas IFR pada pemerintah daerah di Pulau Jawa.

Rasio Kemandirian Finansial (INDEP)

Christiaens (1999) berpendapat bahwa kekayaan pemerintah daerah yaitu pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan, karena pemerintah ingin memenuhi aspek transparansi kepada masyarakat. Pemerintah daerah yang memiliki kekayaan dengan nilai yang tinggi cenderung akan melakukan pengungkapan laporan terhadap publik sebagai bukti bahwa pemerintah daerah telah berhasil menjalankan amanah dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan Prabowo (2016) menyimpulkan bahwa tingkat kemandirian berpengaruh positif terhadap keputusan pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkan laporan keuangan pemerintah daerah melalui Internet. Lasward *et al.*, (2005) juga

menemukan bahwa kekayaan kota berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan sukarela laporan keuangan di internet.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H_4 : Rasio kemandirian finansial (*indep*) berpengaruh positif terhadap aksesibilitas IFR pada pemerintah daerah di Pulau Jawa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif, menggunakan pengujian hipotesis dengan metode statistik. Pendekatan ini akan menafsirkan hasil dari angka statistik mulai dari pengumpulan data, penafsiran data tersebut, serta penampilan dari hasilnya yang akan membuktikan kebenaran dari hipotesis. Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, teramati dan terukur, konkrit, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik (Sugiyono, 2008).

Variabel Penelitian

Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel *dependen* (variabel terikat) merupakan variabel yang ukuran hasilnya dipengaruhi oleh ukuran perubahan variabel *independen*. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Anshori dan Iswati, 2009:57). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah aksesibilitas *Internet Financial Reporting*.

Aksesibilitas IFR didefinisikan sebagai tingkat kemudahan pengguna dalam menemukan dan melihat LKPD di website pemerintah daerah atau biasa disebut *e-government*. Pengukuran dari aksesibilitas IFR menggunakan indeks yang dikembangkan oleh Styles dan Tennyson (2007) yaitu *Accessibility Index Value* untuk masing-masing pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Pulau Jawa. Indikator dari *Accessibility Index Value* merupakan beberapa tahap yang dibutuhkan dan layanan apa saja yang tersedia pada website resmi masing-masing pemerintah daerah. Cara menghitung indeks aksesibilitas pada masing-masing pemerintah daerah yang menyediakan LKPD atau IFR pada situs resminya, dapat dilihat pada lampiran 1. Ukuran yang digunakan untuk aksesibilitas IFR adalah jumlah poin yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah dibagi dengan total poin keseluruhan.

Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel bebas adalah variabel yang sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, dan anteseden. Variabel yang menjadi sebab adanya perubahan atau timbulnya variabel dependen (Anshori dan Iswati, 2009:57). Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu :

Ukuran Pemerintah daerah (*size*)

Jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah tertentu selama periode tertentu merupakan definisi dari populasi penduduk. Penelitian yang dilakukan Styles dan Tennyson (2007) menyatakan bahwa kota-kota dengan jumlah

penduduk yang lebih besar memungkinkan untuk memberikan kemudahan mengakses IFR. Skala nominal untuk mengukur ukuran pemerintah daerah yaitu dengan menggunakan log₁₀ jumlah penduduk suatu pemerintah daerah pada tahun tertentu.

Tingkat hutang suatu daerah (*debt*)

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, Lampiran III yaitu PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, hutang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah di masa depan. Pemerintah dapat menggunakan hutang untuk membiayai pelayanan dan program yang relevan yang disediakan untuk penduduk di daerah tersebut.

Kreditur di tuntutan oleh pemberi hutang (debitur) untuk memberikan transparansi dengan cara yang paling aplikatif atau dengan kata lain aksesibilitas yang lebih mudah dalam hal ini IFR melalui *E-Government* (Gore, 2004). Indikator dalam penelitian ini yaitu hutang dan jumlah penduduk suatu daerah pada tahun tertentu. Skala ukur rasio yang digunakan dalam penelitian ini, berdasarkan penelitian Styles dan Tennyson (2007) yaitu log₁₀ dari membandingkan hutang dan jumlah penduduk suatu daerah pada tahun tertentu.

Rasio kemandirian finansial pemerintah daerah (*indep*)

Kekayaan daerah dapat digambarkan dengan pendapatan asli daerah Christiaens (1999). Menurutnya, semakin tinggi rasio kemandirian finansial maka semakin tinggi pula kualitas aksesibilitas pengungkapan IFR yang dilakukan oleh pemerintah di website resmi pemerintah. Daerah yang memiliki rasio pendapatan asli daerah yang tinggi menandakan bahwa pemerintah daerah memiliki kinerja yang baik. Skala ukur rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan pemerintah daerah.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari informasi yang terdapat dalam *E-Government* masing-masing pemerintah daerah untuk mengetahui nilai *Accessibility Index Value* sebagai variabel dependen. *Website* masing-masing pemerintah daerah di Pulau Jawa. Sedangkan untuk memperoleh data dari variabel *independen*, data dikumpulkan melalui laporan-laporan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah melalui *website* Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu (www.bps.go.id) dan *website* masing-masing pemerintah daerah.

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini, yaitu: data didokumentasikan dari data sekunder yang diperoleh pada sumber data untuk diambil bagian-bagian yang diperlukan dalam penelitian, kemudian dipindahkan dalam tabulasi *excel* untuk mendapatkan nilai sesuai rumus yang dipakai pada masing-masing variabel. Setelah mendapatkan nilai

pada masing-masing variabel penelitian, maka data diproses melalui uji SPSS untuk mendapatkan hasil penelitian.

Populasi Dan Sampel

Menurut Sugiyono (2009), populasi diartikan sebagai bentuk generalisasi yang terdiri dari objek maupun subjek dimana didalamnya terdapat kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam rangka pembelajaran hingga pada akhirnya memberikan suatu kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 pemerintah provinsi, 84 pemerintah kabupaten dan 29 pemerintah kota di Pulau Jawa. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel yaitu pemerintah daerah di pulau Jawa yang memiliki *E-Government* dan dapat diakses (aktif) serta tidak dalam perbaikan sampai dengan 25 September 2018 dan menampilkan IFR tahun 2015.

Teknik analisis data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan tanpa generalisasi (Anshori dan Iswati, 2009:116). Penyajian data yang ada pada statistik deskriptif diantaranya penyajian data melalui grafik, tabel, diagram, perhitungan, persentil, kuartil, desil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, serta perhitungan presentase.

Uji Beda ANOVA

Uji Beda Anova ini digunakan untuk hipotesis pertama (H1) yaitu untuk membandingkan aksesibilitas antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Data yang diperoleh dari hasil *Acessibility Index Value* pada masing-masing IFR pemerintah daerah di web masing-masing pemerintah daerah yang termasuk sampel pada penelitian ini, selanjutnya dianalisis untuk menguji apakah ada perbedaan antara hasil dari *Acessibility Index Value* pada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Alasan digunakan uji anova dalam penelitian ini adalah karena dalam penelitian ini terdapat 3 kelompok yakni pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis kedua sampai hipotesis keempat (H2-H4) dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan SPSS. Adapun tahapan dari analisis regresi linier berganda yaitu: Uji asumsi klasik, Pengujian model regresi dengan koefisien determinasi dan Pengujian hipotesis dengan Uji t. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, model regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{Size} + \beta_2 \text{Income} + \beta_3 \text{Debt} + \beta_4 \text{Indep} + e$$

Dimana :

Y	= Aksesibilitas IFR
α	= Konstanta
$\beta_{1,2,3,4}$	= Koefisien regresi variabel independen
Size	= Ukuran pemerintah daerah
Income	= Pendapatan per kapita
Indep	= Kemandirian finansial pemerintah daerah
e	= Error

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini digunakan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan data terdistribusi secara normal dan tidak terdapat multikolonieritas dan heteroskedastisitas serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 2013:105). Pengujian asumsi klasik ini terdiri dari beberapa tahap, diantaranya: uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran mengenai variabel-variabel yang digunakan. Variabel-variabel tersebut diantaranya: variabel *dependen* (aksesibilitas IFR) yang terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota dan variabel *independen* yaitu ukuran pemerintah (*size*), hutang (*debt*), dan rasio kemandirian finansial (*Indep*). Berdasarkan hasil olah data SPSS versi 22, maka dapat diketahui nilai minimum, maksimum dan rata-rata dari masing-masing variabel-variabel penelitian dari data sekunder pemerintah daerah yang telah memenuhi kriteria sampel, yang disajikan pada Tabel 1

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IFR	40	0.400	0.900	0.7175	0.15671
Provinsi	4	0.900	0.900	0.9000	0.00001
Kabupaten	28	0.400	0.900	0.7000	0.14142
Kota	8	0.400	0.900	0.6875	0.19594
Size	40	5.140	7.670	6.1972	0.50555
Debt	40	2.737	5.117	4.2330	0.48835
Indep	40	0.068	0.760	0.2422	0.19277

Sumber: Hasil Statistik Deskriptif SPSS Versi 22

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa aksesibilitas IFR memiliki rata-rata 0.7175 dengan standar deviasi 0.15671. Hasil dari olahan data memiliki nilai minimum 0.400 dari nilai 1 yang dimiliki oleh Kota Probolinggo dan Kabupaten Rembang. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemudahan untuk mendapatkan informasi keuangan atau IFR melalui *E-Government* Kota Probolinggo dan Kabupaten Rembang hanya 40%. Sedangkan nilai maksimum

0.900 dari nilai 1 dimiliki oleh 11 pemerintah daerah yang terdiri dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Malang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kota Bandung dan Kota Tangerang.

Ukuran pemerintah daerah (*size*) diukur dengan log₁₀ jumlah penduduk pada tahun tertentu di suatu pemerintah daerah. Berdasarkan Tabel 1 rata-rata ukuran pemerintah daerah adalah 6.1972 dengan standar deviasi 0.50555. Variabel ukuran pemerintah memiliki nilai minimum sebesar 5.140 adalah Kota Blitar. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah Kota Blitar pada tahun 2015 paling kecil dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya dalam sampel penelitian ini jika diukur melalui jumlah penduduknya. Sedangkan nilai maksimum variabel ukuran pemerintah adalah 7.670 yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 paling besar dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya dalam sampel penelitian ini jika diukur melalui jumlah penduduknya.

Hutang suatu daerah (*debt*) diukur dengan log 10 total kewajiban suatu pemerintah daerah pada tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Berdasarkan Tabel 1 rata-rata hutang pemerintah daerah adalah 4.2330 dengan standar deviasi 0.48835. Variabel hutang suatu daerah memiliki nilai minimum sebesar 2.737 adalah Kota Malang. Hal ini menunjukkan bahwa hutang pemerintah daerah Kota Malang pada tahun 2015 paling kecil dibandingkan dengan hutang pemerintah daerah lainnya di Pulau Jawa yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Sedangkan nilai maksimum variabel hutang suatu daerah sebesar 5.117 adalah Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa hutang pemerintah daerah Kota Surabaya pada tahun 2015 paling besar dibandingkan dengan hutang pemerintah daerah lainnya di Pulau Jawa yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Kemandirian finansial suatu daerah (*Indep*) diukur dengan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan total pemerintah daerah pada tahun tertentu. Berdasarkan hasil olahan data SPSS versi 22 pada Tabel 1 didapatkan rata-rata 0.2422 dengan standar deviasi 0.19277. Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel rasio kemandirian finansial (*Indep*) memiliki hasil minimum sebesar 0.068 adalah Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar 0.3% dari total pendapatan daerah yang diterima oleh Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2015, sedangkan sisanya 99.7% berasal dari pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah. Hasil maksimum sebesar 0.760 adalah provinsi DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah berkisar 76% dari total pendapatan daerah yang diterima oleh Provinsi DKI Jakarta tahun 2015, sedangkan sisanya 24% berasal dari pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah.

Hasil Pengujian Anova

Pengujian anova pada penelitian ini digunakan untuk menjawab hipotesis pertama (H1) yaitu membandingkan antara aksesibilitas *Internet*

Financial Reporting (IFR) pada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Hasil pengujian anova terdapat pada Tabel 2

Tabel 2
Uji Anova

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	0.149	2	0.075	3.408	0.044
Within Groups	0.809	37	0.022		
Total	0.958	39			

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS Versi 22

Dari Tabel 2 dapat dilihat nilai F adalah 3.408 dan nilai signifikansi adalah 0.044 yang berarti <0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara aksesibilitas IFR pada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Dimana pada pemerintah provinsi, aksesibilitas IFRnya lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Pulau Jawa. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini diterima.

Hasil Pengujian Regresi Berganda

Pengujian regresi berganda pada penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (Ukuran pemerintah, Hutang suatu daerah, dan Rasio kemandirian finansial) terhadap variabel dependen (Aksesibilitas IFR). Untuk mengetahui hal tersebut, adapun beberapa tahap pengujian antara lain: Uji asumsi klasik, Pengujian model regresi dengan koefisien determinasi dan Pengujian hipotesis dengan Uji T.

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ditentukan oleh nilai R Square.

Tabel 3
Hasil Regresi Dengan Koefisien Determinasi (R²)

Variabel Independen	Koefisien	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
(Constant)	0.329	0.481	0.438	0.11746
Size	0.142			
Debt	-0.124			
Indep	0.135			

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS Versi 22

Berdasarkan Tabel 3, didapatkan nilai aksesibilitas IFR sebagai berikut: Aksesibilitas IFR= 0.329 + 0.142Size - 0.124Debt + 0.135Indep + e. Sedangkan untuk nilai R Square adalah sebesar 0.481 (48.1%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah (*size*), hutang suatu daerah (*debt*), dan rasio kemandirian finansial (*indep*) dapat menjelaskan variabel dependen (aksesibilitas IFR) sebesar 48.1%. Sedangkan sisanya 51.9% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Pengujian ini pada dasarnya digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yang terdiri dari ukuran pemerintah (*size*), hutang suatu daerah (*debt*), dan rasio kemandirian finansial (*indep*) terhadap variabel dependen yaitu aksesibilitas IFR, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji t

Variabel Independen	T	Sig	Kesimpulan
(Constant)	0.725	0.473	
<i>Size</i>	2.217	0.033	Signifikan Positif
<i>Debt</i>	-2.945	0.006	Signifikan Negatif
<i>Indep</i>	0.782	0.439	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS Versi 22

Berdasarkan Tabel 4, pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai uji t yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Nilai uji t variabel ukuran pemerintah (*size*) adalah sebesar 2.217 dengan tingkat signifikansi 0.033. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah (*size*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap aksesibilitas IFR. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini diterima.

Nilai uji t variabel hutang suatu daerah (*debt*) adalah sebesar -2.945 dengan tingkat signifikansi 0.006. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hutang suatu daerah (*debt*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap aksesibilitas IFR. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) pada penelitian ini ditolak.

Nilai uji t variabel rasio kemandirian finansial (*indep*) adalah sebesar 0.782 dengan tingkat signifikansi 0.439. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian finansial (*indep*) tidak berpengaruh signifikan terhadap aksesibilitas IFR. Dengan demikian hipotesis keempat (H4) pada penelitian ini ditolak.

Pembahasan

Terdapat Perbedaan Aksesibilitas IFR Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota

Dari Tabel 2 dapat dilihat nilai F adalah 3.408 dan nilai signifikansi adalah 0.044 yang berarti <0.05 , sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara aksesibilitas IFR pada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Dimana pada pemerintah provinsi, aksesibilitas IFRnya lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Pulau Jawa. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini diterima.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian yang dikembangkan oleh Styles dan Tennyson (2007) yang membandingkan kualitas pelaporan IFR di pemerintah provinsi dan pemerintah kota di Amerika Serikat (U.S) dengan menggunakan accessibility index value dan Mann Whitney Test.

Pemerintah provinsi merupakan pemerintah yang lebih disorot oleh masyarakat, sehingga pemerintah provinsi dalam melaksanakan tanggungjawabnya merasa lebih diawasi oleh publik dan para *stakeholder*. Oleh karena itu pemerintah provinsi akan memperbaiki kualitas dari pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR) di internet bila dibandingkan dengan pemerintah kabupaten dan kota. Dari enam provinsi di Pulau Jawa, empat diantaranya yang termasuk dalam sampel penelitian ini yaitu: Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DKI Jakarta. Dari empat provinsi tersebut, semuanya menampilkan IFR hampir sempurna yaitu 0.9 atau 90% dari 100% indikator pada *Accessibility Index Value*.

Ukuran Pemerintah Daerah (Size) Berpengaruh Positif Terhadap Aksesibilitas IFR

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan melihat nilai uji t pada Tabel 4, Nilai uji t variabel ukuran pemerintah (size) adalah sebesar 2.217 dengan tingkat signifikansi 0.033. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah (*size*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap aksesibilitas IFR. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Styles dan Tennyson (2007) yang menyatakan bahwa akses yang lebih mudah terhadap informasi laporan keuangan di internet diberikan oleh kota-kota dengan jumlah penduduk yang lebih besar. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Nosihana dan Yaya, R (2016) yang menyimpulkan bahwa ukuran pemda dan kompetisi politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan IFR di pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia.

Saat ini, pemerintah daerah menghadapi kenaikan permintaan atau tuntutan informasi yang lebih besar oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Umumnya, daerah dengan dengan jumlah penduduk yang besar akan memberikan lebih banyak informasi kepada para penduduknya. Aktivitas program dan pelayanan untuk jumlah penduduk yang besar dengan pengeluaran sumber daya yang besar juga, mengakibatkan permintaan informasi dalam jumlah besar atas informasi kinerja pemerintah. Hal ini menyebabkan semakin besar anggaran untuk aktivitas tersebut dan tentunya semakin tinggi pula tuntutan akan transparansi laporannya.

Permintaan informasi keuangan tersebut dapat diakomodir melalui IFR yang merupakan metode pengungkapan laporan keuangan yang lebih efektif dan aksesibilitasnya tinggi. Semakin tinggi *Accessibility Index Valuenya*, maka *E-Government* pemerintah daerah tersebut semakin baik.

Hutang Suatu Daerah (Debt) Berpengaruh Positif Terhadap Aksesibilitas IFR

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan melihat nilai uji t pada Tabel 4, Nilai uji t variabel hutang suatu daerah (*debt*) adalah sebesar -2.945 dengan tingkat signifikansi 0.006. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hutang suatu daerah (*debt*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap aksesibilitas IFR. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) pada penelitian ini ditolak.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Styles dan Tennyson (2007) yang menyimpulkan bahwa *debt level* atau hutang berpengaruh positif terhadap aksesibilitas IFR. Namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Verawaty (2012) yang mengambil sampel 28 pemerintah daerah di Indonesia dengan *purposive sampling* menyimpulkan bahwa di Indonesia belum terdapat hubungan positif antara *debt* pemerintah daerah dengan proksi rasio hutang terhadap jumlah penduduk dan aksesibilitas IFR melalui penerapan *E-Government*.

Pemerintah menggunakan hutang untuk membiayai pelayan dan program yang relevan bagi penduduk di daerah tersebut. Membiayai pengeluaran daerah dengan hutang mengakibatkan kemampuan daerah untuk menyediakan program dan pelayanan di masa yang akan datang semakin kecil, karena telah terpakai untuk pembiayaan di masa lalu. Pemerintah daerah selaku kreditur harus memberikan laporan keuangannya secara transparansi kepada pemberi hutang (debitur) agar debitur mengetahui kemampuan kreditur untuk melunasi hutangnya. Pemerintah daerah dengan tingkat hutang yang besar seharusnya mempublikasikan laporan keuangannya lebih lengkap dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan tingkat hutang yang kecil.

Diasumsikan bahwa pemerintah daerah dengan tingkat hutang yang kecil lebih berani mempublikasikan laporan keuangannya dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan tingkat hutang yang tinggi, dikarenakan kemungkinan adanya tekanan politis atau kepentingan politis bagi pemerintah daerah dengan tingkat hutang yang tinggi untuk tidak mempublikasikan jumlah hutangnya.

Rasio Kemandirian Finansial (*Indep*) Berpengaruh Positif Terhadap Aksesibilitas IFR

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan melihat nilai uji t pada Tabel 4, Nilai uji t variabel rasio kemandirian finansial (*indep*) adalah sebesar 0.782 dengan tingkat signifikansi 0.439. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian finansial (*indep*) tidak berpengaruh signifikan terhadap aksesibilitas IFR. Dengan demikian hipotesis keempat (H_4) pada penelitian ini ditolak.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan Prabowo (2016) yang menyimpulkan bahwa tingkat kemandirian berpengaruh positif terhadap keputusan Pemerintah Daerah di Indonesia untuk menerapkan laporan keuangan pemerintah daerah melalui Internet. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian Setyaningrum (2012) yang menyimpulkan bahwa rasio kemandirian finansial keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan wajib laporan keuangan pemerintah daerah/kota di Indonesia melalui internet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan daerah tidak mendorong keinginan pemerintah daerah untuk melakukan pelaporan keuangan di internet. Semakin tinggi rasio kemandirian finansial pemerintah daerah menunjukkan semakin mandiri pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga tingkat ketergantungan kepada pihak eksternal menjadi

rendah. Hal inilah yang membuat pemerintah daerah tidak termotivasi untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangannya karena rendahnya tuntutan pihak eksternal akan transparansi dan akuntabilitas LKPD. Selain itu, *Internet Financial Reporting* (IFR) yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak bergantung pada kenaikan pendapatan daerah, melainkan pada rasa tanggungjawab pemerintah daerah itu sendiri untuk melakukan transparansi informasi keuangan serta mematuhi peranturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah.

Pada kenyataannya banyak pemerintah daerah dengan rasio kemandirian finansial yang rendah tapi menampilkan IFR yang tinggi, beberapa diantaranya adalah Kabupaten Malang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri . Beberapa pemerintah daerah tersebut memiliki tingkat rasio kemandirian finansial 0.09-0.14, tapi mereka menampilkan IFRnya 0.9 atau 90% dari 100% *Acessibility Index Value*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Terdapat perbedaan aksesibilitas IFR pada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota di Pulau Jawa. Implikasinya, pemerintah harus membuat peraturan yang hukumnya wajib atau standarisasi untuk menyamakan kualitas IFR pada masing-masing pemerintah daerah dengan SOP atau aturan baku, dimana akan ada sanksi apabila pemerintah daerah tidak memenuhi aturan tersebut. Sehingga setiap pemerintah daerah akan menampilkan IFRnya sesuai dengan peraturan yang berkalu wajib dan hal tersebut dapat membuat aksesibilitas IFR masing-masing pemerintah daerah menjadi tinggi.

Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap aksesibilitas IFR pada pemerintah daerah di Pulau Jawa. Implikasinya pemerintah harus memperbanyak program dan pelayanan untuk penduduknya, terbukti dengan semakin banyak program dan pelayanan untuk penduduk yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maka aksesibilitas IFRnya juga tinggi karena semakin banyak juga yang harus dilaporkan.

Tingkat hutang suatu daerah berpengaruh negatif terhadap aksesibilitas IFR pada pemerintah daerah di Pulau Jawa. Implikasinya pemerintah daerah harus mengurangi jumlah hutang dari pihak eksternal dan berusaha memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga pemerintah daerah bisa menampilkan aksesibilitas IFR yang tinggi.

Rasio kemandirian finansial tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas IFR pada pemerintah daerah di Pulau Jawa. Implikasinya, karena aksesibilitas IFR lebih pada kesadaran dan tanggung jawab pemerintah daerah, maka dapat dilakukan pelatihan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan pengawasan dari pihak atau jajaran yang lebih tinggi agar aksesibilitas IFR pada masing-masing pemerintah daerah menjadi tinggi.

Saran

Saran diuraikan selaras dengan pembahasan dan simpulan. Berikut inisaran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya adalah bagi penelitian selanjutnya menggunakan sampel penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, seperti mengambil sampel pulau yang lain yang belum pernah dilakukan dalam penelitian dan menambahkan variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap aksesibilitas *Internet Financial Reporting*(IFR), misalnya : tingkat penggunaan internet di suatu daerah, tingkat pendidikan masyarakat, dan sumber pengelola *website*.

Pemerintah daerah sebaiknya berupaya untuk memperbaiki situs resmi masing-masing pemerintah daerah atau *E-Government* dengan mendesain semenarik dan selengkap mungkin, khususnya keterbukaan informasi keuangan. Selain itu pemerintah daerah juga diharapkan dapat berperan aktif mengikuti acara yang dibuat oleh Kemendagri mengenai *E-Government Award* yang digunakan sebagai motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki *E-Government*nya. Sedangkan salah satu hal yang dapat dilakukan masyarakat yaitu mengevaluasi hasil kinerja pemerintah dengan memanfaatkan layanan kritik dan saran terhadap tampilan dan isi dari IFR masing-masing pemerintah daerah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan penelitian. Adapun hal-hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: Penelitian ini hanya dilakukan pada pemerintah daerah di Pulau Jawa yang menampilkan IFR tahun 2015 dikarenakan mayoritas dari pemerintah daerah di Pulau Jawa hanya menampilkan IFR tahun 2015. Sehingga tidak bisa dibandingkan dengan laporan terbaru yaitu IFR tahun 2016 dan tahun 2017. Selain itu, masih banyak faktor yang dapat digunakan untuk menjelaskan determinan yang mempengaruhi aksesibilitas *Internet Financial Reporting*(IFR) pada pemerintah daerah di Pulau Jawa. Karena hanya dua faktor yang berpengaruh signifikan pada penelitian ini dari tiga faktor yang menjadi hipotesis penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Anshori, M. dan I. Sri. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP).
- Christiaens. 1999. Financial Accounting Reform In Flemish Municipalities : An Empirical Investigation. *Journal Of Accounting*. Volume 15, Issue 1.
- Evans, J. P. 1987. Signaling and Monitoring In Public Sector Accounting. *Journal of Accounting Research 25 (Supplement)*. Pages:130-158.
- Giroux, G. dan S. David. 1993. Accounting Controls and Bureaucratic Strategies in Municipal Government. *Journal of Accounting and Public Policy*, 12: 239-262.
- Giroux, G. dan M. A. John. 2003. Governance Structures and Accounting at Large Municipalities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22: 203-230.
- Gore, A. 2004. The Effects of GAAP Regulation and Bond Market Interaction on Local Government Disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*. 23: 23-52.
- Gozhali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi, Edisi 7*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Halim, A. dan A. Syukriy. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol. 2 No. 1.
- Indrajit, R. E. 2004. *E-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Laswad, F., R. Fisher., dan P. Oyelere. 2005. Determinants Of Voluntary Internet Financial Reporting By Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*. 24: 101-121.
- Nosihana dan Y. Rizal. 2016. Internet financial Reporting Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, Vol.3(2) 1 Oktober 2016.
- Setyaningrum, D. dan S. Fitri. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154-170.
- Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pelaporan Keuangan.
- Styles dan Tennyson. 2007. The Accessibility Of Financial Reporting Of U.S. Municipalities On The Internet. *J. OF PUBLIC BUDGETING, ACCOUNTING & FINANCIAL MANAGEMENT*, 19 (1), 56-92.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Verawaty. 2012. The Accessibility of Public Information of Local Government through E- Government in Indonesia. *Proceedings of International Public Sector Conference (IPSC)*. Kinabalu Malaysia. pp. 044 (1-9).

- Wicaksono dan Prabowo. 2016. Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD114) Melalui Internet (IFLR) Dan Faktor Yang Mempengaruhi. *Journal of Accounting Research*, Vol XVI No 1 Januari 2016.
- Zimmerman, J. L. 1977. The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. *Journal of Accounting Research*.

Lampiran 1 ***Accessibility Index Value***

- + 1 Poin jika situs resmi pemerintah daerah muncul di halaman pertama hasil pencarian di Google atau Yahoo dengan menggunakan nama pemerintah provinsi, kabupaten atau kota (A).
 - + 1 Poin jika situs resmi pemerintah daerah memiliki tautan ke data IFR di beranda situs web (B).
 - + 1 Poin jika situs resmi pemerintah daerah memiliki mesin pencari yang menemukan IFR menggunakan istilah IFR dan / atau laporan keuangan (C).
 - + 1 Poin jika hanya diperlukan tiga kali klik atau kurang untuk melihat data IFR dari *website* pemerintah daerah (D).
 - + 1 Poin jika IFR dapat dilihat dan diunduh di situs resmi pemerintah daerah dalam format PDF atau HTML (E).
 - + 1 Poin jika pemerintah daerah menyediakan data IFR lebih dari satu file; file untuk berbagai bagian / halaman penuh (F).
 - + 1 Poin jika file individual yang menyediakan data IFR berukuran kurang dari 3MB (G).
 - + 1 Poin jika situs resmi pemerintah daerah menyediakan data IFR untuk tahun-tahun sebelumnya (H).
 - + 1 Poin jika situs resmi pemerintah daerah menyediakan informasi untuk mendapatkan atau mengakses salinan cetak IFR (I).
 - + 1 Poin jika situs resmi pemerintah daerah menampilkan kontak (telepon dan / atau email) untuk perorangan / departemen (J).
- = skor maksimal adalah 10 poin

Sumber : Styles dan Tennyson (2007)